

PERKEMBANGAN KOTAPRAJA MEESTER CORNELIS (JATINEGARA) TAHUN 1905-1935 Wahyudin Alim Sani¹

Abstract

This research aim is to describe about development of The Municipality Meester Cornelis (Jatinegara) in decentralization period between 1905-1935. Decentralization in Dutch East Indies began in 1903 with the issuance of decentralisatie wet 1903. The formation of Meester Cornelis to become one of the gemeente areas is related to the presence of Dutch people living there and demanding self-government managed by the Dutch. In addition, Meester Cornelis qualifies to become an autonomous region thanks to the finance it gets from trade. In the period 1905–1925, Gemeente Meester Cornelis experienced ups and downs in the regional financial aspect until a crisis occurred due to an error in land acquisition at the land company (Grondbedrijf). Development is aimed at supporting facilities for the community in socio-economic aspects and public transportation. Meester Cornelis turned into a stadsgemeente because of the 1922 decentralization law. The development of Meester Cornelis in the 1926–1935 period continued for financial affairs and urban development through the role of municipal companies. Territorial unification with Stadsgemeente Batavia ended the journey of independent government for Stadsgemeente Meester Cornelis.

Keywords: Meester Cornelis, Jatinegara, decentralization, gemeente, municipality.

A. Pendahuluan

Politik etis merupakan politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda terhadap wilayah jajahannya atau dalam hal ini adalah Hindia Belanda. Pelaksanaan politik etis terwujud berkat dorongan sebagian tokoh parlemen Belanda dengan alasan sebagai balas budi kepada Hindia Belanda karena telah mengisi kekosongan kas Belanda. Pelaksanaan *cultuurstelsel* oleh Van den Bosch telah membawa banyak keuntungan bagi negeri Belanda. Menurut seorang Sosialis Demokrat Josef Emanuel Stokis, Belanda telah memperoleh keuntungan dari tanam paksa ini sebesar 823 juta gulden sejak keuntungan pertama tahun 1931.² Eksploitasi pada masa itu sangat masif dan memperlakukan Hindia Belanda sebagai sapi perah tanpa memperhatikan hak-haknya sebagai daerah

koloni.³ Pemerintah Belanda juga menyadari bahwa Hindia Belanda bukan lagi daerah *wingewest* (daerah yang menguntungkan).⁴

Ratu Wilhelmina mengisyaratkan “misi moral” baru bagi para pegawai pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda yakni sumbangan pengembangan sekolah-sekolah dan pelayanan kesehatan, transportasi, dan pengembangan infrastruktur lainnya bagi penduduk pribumi.⁵ Hal itu juga termasuk pada perubahan bentuk pemerintahan di Hindia Belanda. Program tersebut diharapkan membuat kehidupan pribumi di Hindia Belanda lebih baik dan layak.

Pemerintahan Hindia Belanda menganut sistem sentralis yang mana segala kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat. Ketakutan Belanda akan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

² Teti Hestiliani, “Secentralisatie Wet van Nederland Indies 1903”, dalam *Istoria*, Vol. 15, No. 2, hlm. 207.

³ Frances Gouda, *Dutch Culture Overseas Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 53.

⁴ Teti Hestiliani, *op.cit.*, hlm. 211.

⁵ Frances Gouda, *loc.cit.*

lepasnya Hindia Belanda mendorong pemerintah Belanda melaksanakan kekuasaan terpusat. Undang-undang pada sistem pemerintahan di Hindia Belanda disusun dari negeri Belanda.⁶ Namun, setelah terwujudnya politik etis yang disuarakan langsung oleh Ratu Wilhelmina pada Hindia Belanda turut mempengaruhi perubahan dari bentuk pemerintahan sentralisasi ke bentuk pemerintahan desentralisasi.

Orang-orang Eropa dan Belanda banyak berdatangan ke Hindia Belanda untuk bekerja di perkebunan swasta. Hal ini dampak dari pelaksanaan ekonomi liberal yang diterapkan sejak 1870. Kepadatan penduduk di kota-kota besar Hindia Belanda lambat laun mengakibatkan lingkungan di daerah yang indah di mata orang-orang Belanda menjadi rusak. Permasalahan lokal tersebut tidak mampu diselesaikan oleh pemerintahan pusat.⁷ Kebutuhan akan bentuk pemerintahan desentralisasi ditujukan agar daerah-daerah tersebut dapat mengurus permasalahan lokal. Tuntutan tersebut turut disampaikan di parlemen Belanda yang menuntut perlu perubahan bentuk pemerintahan di Hindia Belanda dan daerah jajahan lainnya. Hal ini didukung oleh L.W.C Keuchenius yang mengangkat kembali usulan tersebut dan mendapat dukungan juga dari W.K. Baron van Dedem (1881), J. Th Cremer dan S. Van Houten (1887).⁸ Perubahan struktur pemerintahan ini juga dimaksud agar tidak terlalu bergantung pada Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal Hindia Belanda van Der Wijck sendiri mendukung perubahan struktur pemerintahan. Ia nilai pemerintah pusat sudah tidak mampu menangani permasalahan lokal yang semakin kompleks.

⁶ Teti Hestiliani, *op.cit.*, hlm. 207.

⁷ *Ibid*, hlm. 210.

⁸ *Ibid*.

⁹ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa*

Menanggapi banyaknya tuntutan tersebut, pemerintah Belanda menyusun rancangan undang-undang tentang desentralisasi pemerintahan daerah koloni. Tahun 1901 mulai diizinkan politik etis sebagai undang-undang baru yang memungkinkan terealisasinya sistem desentralisasi. Pada 1903 secara resmi mengesahkan undang-undang desentralisasi *Wet Houdende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indië* atau lebih dikenal dengan *Decentralisatie Wet 1903* melalui *Nederlandsche Staatsblad* tahun 1903 No. 219 dan *Indische Staatsblad* tahun 1903 No. 329. Hal ini menandai awal pembentukan daerah otonom. Daerah otonom juga membagi tiga wilayah kota menjadi kotapraja (*gemeente*) melalui *Decentralisatie Besluit* tahun 1905 No. 137. Tiga kota tersebut yakni Batavia dalam *Staatsblad* 1905 No. 204, Meester Cornelis dalam *Staatsblad* 1905 No. 206, dan Buitenzorg dalam *Staatsblad* 1905 No. 208.⁹

Nama Meester Cornelis saat ini mungkin terdengar asing di telinga orang-orang awam. Faktanya nama Meester Cornelis ini pernah digunakan pada masa pendudukan kolonial Belanda sampai kedatangan Jepang ke tanah air. Nama Meester Cornelis diambil dari nama tuan tanah di daerah itu yaitu Cornelis Senen. Ia membuka lahan perkebunan di sana pada tahun 1656. Pemerintah Jepang mengubah nama Meester Cornelis menjadi Jatinegara yang dikenal sampai sekarang. Pada masa pemerintahan sentralisasi berdasarkan *regeringsreglement* 1854, Meester Cornelis menjadi wilayah *afdeeling* di bawah Karesidenan Batavia.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, *Gemeente* Meester Cornelis cukup menarik untuk dibahas bagaimana peran dan

Tengah, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm. 18.

¹⁰ The Liang Gie, *Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta* (Jakarta: Kotapradja Djakarta Raja, 1958), hlm. 82.

perkembangannya pada saat pemberlakuan sistem desentralisasi. Kota Meester Cornelis disebutkan menjadi fokus dalam perluasan wilayah Batavia menuju kota kolonial. Penelitian ini, berfokus untuk membahas sejarah Meester Cornelis (Jatinegara) dalam lingkup desentralisasi secara lebih mendalam, khususnya mengenai sistem desentralisasi dan dampaknya terhadap perkembangan kota.

B. Metode

Penelitian ini mengangkat tema sejarah perkembangan kota. Metode penelitian yang digunakan ialah metode sejarah. Metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau melalui empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.¹¹

Heuristik merupakan teknik pengumpulan sumber sejarah. Sumber sejarah adalah data mutlak bagi sejarawan dalam menulis sejarah. Tidak adanya data maka tidak ada sejarah. Sumber sejarah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sumber tertulis, sumber lisan dan benda atau artefak. Kaitannya dalam penelitian ini ialah menekankan pada pengumpulan sumber yang sezaman dengan penelitian baik itu arsip, buku atau surat kabar.

Kedua yakni kritik sumber yang terdiri dari kritik internal dan eksternal. Kritik sumber dilakukan secara sistematis diawali dengan kritik eksternal dan kemudian kritik internal. Kritik eksternal yakni penentuan keasliannya dilihat dari sumber yang digunakan berkaitan dengan data dari sumber tersebut atau fisik dari sumber. Kritik internal yaitu penyeleksian informasi dalam sumber sejarah dapat dipercaya atau tidak.

Ketiga ialah interpretasi yaitu menafsirkan dan mengolah sumber yang telah dikritik kemudian dirangkai. Tahap ini memerlukan sikap objektif sejarawan untuk menafsirkan sumber menjadi fakta sejarah. Pada tahap ini dilakukan penguraian dan penyatuan data yang sesuai dengan topik yang dibahas.

Terakhir adalah historiografi yakni tahap penulisan keseluruhan sejarah yang telah dirangkai menjadi sebuah tulisan sejarah. Isi tulisan bernilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber yang telah selesai diinterpretasi, kemudian dirangkai menjadi satu tulisan.

C. Meester Cornelis (Jatinegara) Sebelum Desentralisasi

Meester Cornelis saat ini dikenal dengan nama Jatinegara yang terletak di wilayah Jakarta Timur. Penamaan Jatinegara terdapat beberapa versi menurut beberapa pendapat ada yang berarti "negara sejati" dan pendapat lainnya adalah karena di wilayah tersebut dulunya merupakan kawasan hutan jati. Kawasan ini merupakan tempat pelarian Pangeran Jayakarta Wijayakrama setelah Jayakarta jatuh ke tangan VOC pada awal abad ke-17. Arti Jatinegara sebagai "pemerintahan yang sejati" adalah nama yang diberikan oleh Pangeran Jayakarta yang membuat pemerintahan darurat di sana.¹² Pangeran Jayakarta membuka daerah hutan di tepi sungai Ciliwung yang banyak ditumbuhi pohon jati bersama dengan para pengikutnya. Nama Jatinegara mulai digunakan kembali pada tahun 1942 dibawah pemerintahan Jepang untuk menggantikan nama Meester Cornelis yang dianggap kental beraroma Belanda.¹³

Pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan nama Meester Cornelis. Nama

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2009, hlm. 13.

¹³ Rachmat Ruchiat, *Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta*, (Jakarta: Masup Jakarta, 2018), hlm. 61.

¹¹ Abd Rahman Hamid dan M. Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 43.

¹² Rinno Widiyanto, "Gereja Koinonia, Meester Cornelis Jatinegara, Gaya dan Ragam Hias", *Skripsi*,

Meester Cornelis sebenarnya berasal dari nama seorang tokoh berpengaruh bernama Cornelis Senen.¹⁴ Penggunaan namanya untuk menamai kawasan tersebut tidak terlepas dari perannya yang membuat kawasan tersebut jadi berkembang. Cornelis Senen adalah seorang pemuka agama yang berasal dari Lontor, Pulau Banda. Setelah Maluku diambil alih oleh Belanda, Ia pergi ke Batavia pada tahun 1621. Pada tahun 1656, Ia mendapat izin untuk mengelola sebidang tanah di tepi Sungai Ciliwung.¹⁵ Lahan ini membentang dari Tjipinang hingga Tjiliwoeng yang luasnya kurang lebih 5 km².¹⁶ Sebagai pemuka agama, Cornelis Senen mendapat panggilan *meester* yang berarti tuan guru. Begitu pula dengan wilayah yang ditempati disebut Meester Cornelis. Sebagai pejabat VOC, Cornelis Senen berkontribusi dalam pengembangan wilayah Jatinegara dengan mengelola hasil hutan dan membuka perkebunan yang mengutamakan keuntungan bagi masyarakat sekitar.

Pasar di Meester Cornelis bercikal bakal dari pasar kerbau yang didirikan pada tahun 1706.¹⁷ Pasar ini didirikan sebagai tempat singgah para pedagang dalam perjalanannya menuju pusat kota Batavia. Selanjutnya, rutin diadakan pasar pada setiap hari kamis yang kemudian di sekitarnya didirikan permukiman Cina.¹⁸ Orang-orang Cina semakin banyak yang datang ke Meester Cornelis. Pada saat itu, Meester Cornelis menjadi salah satu daerah pecinan terbesar di Batavia. Setelah terjadinya peristiwa pembantaian terhadap orang-orang Cina pada tahun 1740, maka

pemerintah VOC saat itu menempatkan kelompok-kelompok etnis di luar tembok Kota Batavia, khususnya yang dianggap dapat menimbulkan kekacauan dalam satu wilayah agar lebih mudah dikontrol, seperti etnis Cina yang ditempatkan di Glodok.¹⁹ Namun, tidak semua kelompok etnis di luar tembok disebabkan karena kekacauan, etnis lain juga diberi kebebasan mendirikan permukiman di luar tembok.²⁰ Kelompok-kelompok ini banyak menghuni wilayah sepanjang Sungai Ciliwung yang saat itu menjadi jalur transportasi terbaik. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama kampung yang didirikan di pinggiran Ciliwung, Meester Cornelis antara lain adalah Kampung Jawa, Kampung Bali, Kampung Melayu, Kampung Ambon dan Kampung Bidara Cina.

Pada abad ke-18 wabah malaria merebak di Batavia sehingga mengakibatkan para penduduk banyak yang mati.²¹ Pada saat itu, daerah Meester Cornelis telah difungsikan sebagai markas militer. Kamp pengungsian didirikan di Meester Cornelis yang menjadi daerah bebas malaria untuk memulihkan para prajurit militer.²² Memasuki abad ke-19, Meester Cornelis berkembang sebagai pusat pertahanan dengan dibangunnya benteng dan sekolah militer.²³ Meester Cornelis menjadi wilayah pertama dan satu-satunya yang dipertahankan dengan serius oleh Gubernur Janssens saat kedatangan Inggris di Jawa tepatnya di Cilincing pada 1811. Namun, akhirnya berhasil jatuh ke tangan Inggris.

¹⁴ Abdurrachman Surjomihardjo, *Perkembangan Kota Jakarta*, (Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah Pemerintah DKI Jakarta, 1977), hlm. 28.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ F. De Haan, *Oud Java*, (Weltevreden: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en G. Kolff & Co, 1922), hlm. 426.

¹⁷ F. W. M. Kerchman, *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indië 1905-1930*, (Weltevreden: G. Kolff & Co., 1930), hlm. 232.

¹⁸ F. De Haan, *op.cit.*, hlm. 427.

¹⁹ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: TransMedia, 2008), hlm. 120-121.

²⁰ Aryandini Novita dan M. Irfan Mahmud, "Tata Ruang Etnis dan Profesi dalam Kota (Abad XVII-XVIII)", *Berkala Arkeologi*, Vol. 19 No. 2, 1999, hlm. 88.

²¹ P.H. van der Brug, "Malaria in Batavia in 18th Century", *Tropical Medicine and International Health*, Vol. 2 No. 9, September 1997, hlm. 893-894.

²² F.W.M. Kerchman, *loc.cit.*

²³ Abdurrachman Surjomihardjo, *loc.cit.*

Pada 19 Agustus 1816 Hindia Belanda secara resmi diserahkan kembali oleh Inggris kepada pihak Belanda.²⁴ Roda pemerintahan kembali dijalankan dengan hukum Kerajaan Belanda. Terdapat perubahan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan di Hindia Belanda dengan ditetapkannya *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch-Indië* pada 2 September 1854 dan diundangkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 2 tahun 1855. Perubahan tersebut menetapkan ketatanegaraan Hindia Belanda menganut sistem sentralis. Di samping itu juga menjalankan sistem dekonsentrasi dalam membantu pemerintah pusat dengan membentuk *residentie*, *afdeeling*, *district* dan *onderdistrict*. Sejak itu Meester Cornelis menjadi salah satu *afdeeling* dari Karesidenan Batavia.²⁵

Desentralisasi dilaksanakan di Hindia Belanda sehubungan dengan banyaknya tekanan dari tokoh-tokoh di Belanda tentang gagalnya sistem sentralisasi terhadap permasalahan yang ada di daerah. Sistem sentralisasi sudah tidak efektif dalam menghadapi permasalahan yang lebih kompleks di daerah. Undang-undang yang mengatur desentralisasi dimuat dalam *Decentralisatie Wet* 1903. Sementara itu perubahan dan pembagian wilayah otonom dalam *Decentralisatie Besluit* tahun 1905 No. 137 menjadi tiga *gemeente* yakni Batavia dalam *Staatsblad* 1905 No. 204, Meester Cornelis dalam *Staatsblad* 1905 No. 206, dan Buitenzorg dalam *Staatsblad* 1905 No. 208. Wilayah yang dijadikan *gemeente* adalah ibukota *afdeeling* Meester Cornelis dari *Residentie Batavia* pada masa pemerintahan terpusat.²⁶ Luas wilayahnya yaitu sekitar 16 km persegi.²⁷ Secara umum

penetapan Meester Cornelis sebagai salah satu *gemeente* tentunya memiliki alasan.

Pertama, syarat dalam penunjukkan wilayah sebagai *gemeente* yaitu sebuah wilayah harus mempunyai kekuatan finansial. Pemberian hak otonom juga berarti wilayah bersangkutan dibiayai oleh wilayah itu sendiri. Sesuai dengan bunyi pasal 68a perubahan pada *Regeringsreglement* 1854 yakni "Jika keadaan memungkinkan, untuk wilayah atau bagian-bagian dari wilayah akan diberikan uang dari daerah yang bersangkutan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah itu. Penunjukan wilayah atau bagian dari wilayah, dimana ketentuan di atas akan diterapkan, sejumlah uang dipisahkan dan kebutuhan yang bersangkutan tidak akan dibiayai lagi dari keuangan umum Hindia Belanda, diselenggarakan dengan ordonansi." *gemeenteraad* (dewan kotapraja) bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengelola keuangan. Anggaran yang disusun oleh dewan awalnya berkaitan dengan kebutuhan daerah yang kemudian diserahkan ke pemerintah pusat. Seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka anggaran yang disusun sesuai dengan pendapatan tersebut.

Meester-Cornelis sudah ada sebelum Weltevreden berdiri dan mempunyai fungsinya sendiri sebagai tempat garnisun.²⁸ Hal ini juga didorong akibat dari dibangunnya pasar di wilayah tersebut. Letak Meester Cornelis yang menguntungkan dengan dilalui jalan utama ke selatan dari Batavia lalu membelah ke dua arah Krawang dan Buitenzorg, sehingga menjadi lokasi strategis dalam perdagangan. Keberadaan jalan tersebut telah membuat perekonomian Meester

²⁴ The Liang Gie, *Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta*, *op.cit.*, hlm. 29.

²⁵ *Ibid*, hlm. 82.

²⁶ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1905 No. 206.

²⁷ Departement van Landbouw, *Volkstelling 1930: Inhemische Bevolking van West-Java Deel 1*, (Batavia: Landsdrukkerij, 1933), hlm. 7.

²⁸ F.W.M. Kerchman, *op.cit.*, hlm. 233.

Cornelis meningkat, begitu pula dengan Batavia dan khususnya Weltevreden.

Kedua, perubahan sistem perekonomian di Hindia Belanda yang sebelumnya diatur oleh pemerintah, kemudian berganti ke sistem liberal yang memberikan kesempatan pada pihak swasta untuk menanamkan modal di Hindia Belanda, sehingga banyak perusahaan swasta yang dibuka.²⁹ Pada akhir abad ke-19 banyak kantor-kantor dagang dan bank-bank yang didirikan di kota-kota besar di Indonesia. Hal tersebut menjadi pendorong orang-orang Belanda dan Eropa datang berbondong-bondong untuk bekerja. Akibatnya jumlah populasi di wilayah tersebut meningkat.

Sebagai salah satu wilayah *afdeeling* di Karesidenan Batavia, Meester Cornelis telah memiliki pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh orang-orang Belanda dan juga Eropa. Keberadaan orang-orang Eropa di sana akibat dari semakin sempit dan semrawutnya pusat kota Batavia. Orang-orang Eropa banyak yang membangun tempat peristirahatan di pinggiran kota. Orang-orang Eropa ini lambat laun bermukim dan membentuk komunitas-komunitas yang terorganisasi dengan baik. Pemberian wewenang menyelenggarakan desentralisasi diberikan jika daerah tersebut telah dianggap memenuhi kriteria, khususnya daerah perkotaan yang banyak dihuni orang Eropa.³⁰ Pada tahun 1900, total orang-orang Eropa yang tinggal di Meester Cornelis yaitu mencapai 2.279 jiwa.

³¹

Tujuan desentralisasi pemerintahan yaitu untuk mengatur orang-orang Belanda. Lahirnya gagasan ini dilatarbelakangi oleh

²⁹ Teti Hestiliani, *op.cit.*, hlm. 210-211.

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda*, (Malang: Bayumedia, 2004), hlm. 80.

³¹ H. Blink, *Nederlandsch Oost- en West-Indie*, (Leiden: E. J. Brill, 1907), hlm. 96.

³² Effendi Wahyono, Effendi Wahyono, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pada Masa

keinginan warga negara Belanda di Hindia Belanda dalam hal perlindungan dan pengelolaan warga Belanda dengan melibatkan warga masyarakatnya sendiri.³² Dengan dibentuknya pemerintahan daerah dengan hak otonomi diharapkan kesejahteraan dan segala keperluan warga Belanda dan Eropa dapat terpenuhi dengan baik.

D. Perkembangan Gemeente Meester Cornelis (Jatinegara) Tahun 1905-1925

Berdasarkan *Staatsblad* 1905 No. 206, Meester Cornelis secara resmi ditetapkan sebagai salah satu wilayah yang mendapatkan status *gemeente* sesuai amanat *decentralisatie wet* 1903 di Hindia Belanda. Langkah awal dalam mewujudkan desentralisasi yaitu dengan membentuk *raad* (dewan) yang nantinya akan bertugas untuk mengawasi dan mengelola keuangan *Gemeente* Meester Cornelis. Dewan pertama terdiri dari 8 orang Eropa, 2 orang pribumi dan 1 orang Cina, semuanya ditunjuk oleh Pemerintah dan dipertemukan untuk pertama kalinya pada tanggal 18 April 1905 di gedung di General-Staalplein.³³ Awal pembentukan tahun 1905, jabatan ketua dewan dipegang oleh Asisten Residen Meester Cornelis, P. W. Hartelust. Baru pada 1921, kepemimpinan dewan maupun kota beralih ke tangan *Burgemeester* Meester Cornelis, van Doorninck.

Dalam rangka pembangunan kota, Dewan Kotapraja Meester Cornelis melakukan pembelian pada tanah-tanah partikelir yang dimiliki oleh masyarakat melalui *Grondbedrijf* (Perusahaan Tanah). Pembelian tanah mengalami banyak

Pemerintahan Hindia Belanda: Perubahan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Bestuursvormingswet 1922", *Disertasi*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2009, hlm. 51.

³³ F.W.M. Kerchman, *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indië 1905-1930*, (Weltevreden: G. Kolff & Co., 1930), hlm. 233.

hambatan. Hingga akhirnya pembelian tanah dengan biaya terlalu tinggi mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian besar.

Upaya penanggulangan dilakukan dengan memisah anggaran kota berdasarkan skala prioritas menjadi dua yakni anggaran biasa dan anggaran luar biasa. Guna menutupi kerugian keuangan tersebut, pemerintah memberlakukan pajak seperti pajak perizinan, pajak anjing, pajak hiburan, pajak jalan kemudian menjadi pajak tanah *verponding*, pajak kendaraan bermotor, dan pajak kendaraan tidak bermotor. Terkait dengan tanah yang telah dibeli, pemerintah kota juga tetap membangun perumahan yang akan disewakan ataupun dijual untuk mengisi kas, seperti pada tanah Matraman.

Selain untuk keuangan kota, pemerintah kota juga berupaya memperhatikan masyarakat dengan membangun dan memperbaiki berbagai fasilitas publik seperti membeli tanah seluas 6.000 M² yang akan digunakan untuk perluasan makam penduduk pribumi.³⁴ Perbaikan pada jalan dan kampung-kampung juga turut dilakukan. Lalu pada sektor perekonomian, pembangunan pasar baru yang selesai pada tahun 1925.³⁵

Pada 1910 dibangun stasiun kereta api Meester Cornelis yang berada di jalur menuju Bandoeng. Pembangunan stasiun diarsiteki oleh S. Snuyff selaku Kepala sementara BOW. Pada awalnya, stasiun ini juga disebut Rawah Bangke, berdasarkan rawa di dekatnya, juga untuk membedakannya dari stasiun NIS-Meester Cornelis di seberang sungai.³⁶

Stasiun Meester Cornelis SS (sekarang Jatinegara) terhubung ke arah Tanah Abang berkat adanya Stasiun Manggarai sebagai

stasiun penghubung. Jalur penghubung ke Stasiun Manggarai dari arah Stasiun Meester Cornelis SS ditinggikan agar dapat melintas di atas Sungai Ciliwung sehingga dibangun jembatan yang terbuat dari beton di atas jalan Matraman.

NITM berencana membangun jalur trem ganda di Meester Cornelis. Pada tahun 1910 NITM meminta izin kepada pemerintahan Meester Cornelis. Izin penggandaan jalur trem di Meester Cornelis ini mendapat persetujuan dari pemerintah, tetapi harus diawasi dengan ketat dari semua sisi dan hanya diizinkan pada sebagian jalan.³⁷ Jalur ganda tersebut dibangun di atas Kerkstraat. Pada tahun 1925/26 untuk pengadaan jalur ganda, maka terlebih dahulu diperlukan pelebaran jalan pada Kerkstraat. Biaya pelebaran jalan ditanggung oleh pemerintah pusat dan NITM.³⁸

E. Perkembangan Stadsgemeente (Kotapraja) Meester Cornelis (Jatinegara) Tahun 1926-1935

Undang-undang desentralisasi yang diundangkan melalui *decentralisatie wet* 1903 dianggap kurang memuaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlalu sedikit keuangan yang diberikan kepada daerah dan sangat terbatas wewenang yang dapat dijalankan.³⁹ Selain itu, juga dinilai belum mampu merangkul berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam upaya menyukseskan desentralisasi di Hindia Belanda. Kurang dilibatkannya orang-orang pribumi dalam pemerintahan desentralisasi mendorong para simpatisan politik etis untuk menuntut perubahan pada undang-undang desentralisasi. Perubahan terhadap undang-undang desentralisasi diwujudkan dengan diterbitkannya *Wet op de*

³⁴ F. W. M. Kerchman, *op.cit.*, hlm 235.

³⁵ "Opening Centrale Pasar te Mr. Cornelis", *Bataviaasch Nieuwsblad*, 17 Agustus 1925.

³⁶ Michiel van Ballegoijen de Jong, *Spoorwegstations op Java*, (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1993), hlm. 104.

³⁷ F.W.M. Kerchman, *op.cit.*, hlm. 236.

³⁸ *Ibid*, hlm. 251.

³⁹ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia: Jilid I* (Jakarta: Gunung Agung, 1967), hlm. 23.

Bestuurshervorming dalam *Staatsblad* 1922 No. 216. Undang-undang baru ini difokuskan untuk lebih memperhatikan penduduk pribumi. Pembentukan badan-badan pemerintahan baru turut mengikutsertakan pribumi. Mereka diberi hak untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembebanan tanggung jawab. Pembentukan daerah otonom baru yaitu provinsi, kabupaten dan kotapraja. Ketentuan-ketentuan dalam *Bestuurshervormingswet* 1922 itu kemudian diatur lebih lanjut dengan *Provincieordonnantie* dalam *Staatsblad* 1924 No. 78, *Regentschapsordonnantie* dalam *Staatsblad* 1924 No. 79 dan *Stadsgemeenteordonnantie* dalam *Staatsblad* 1926 No. 365.

Perubahan undang-undang desentralisasi tahun 1922 tidak mempengaruhi struktur pejabat pemerintahan sebelumnya. Baik wali kota dan dewan masih melakukan tugasnya seperti biasanya. Pada kenyataannya yang berubah hanya dasar konstitusinya, yang semula merujuk pada peraturan perundangan desentralisasi tahun 1903. Perubahan juga terjadi pada penamaan status yang semula *gemeente* berubah menjadi *stadsgemeente*. Dengan ini, *Stadsgemeente* Meester Cornelis menyelenggarakan hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya menurut undang-undang desentralisasi tahun 1922. Berdasarkan undang-undang desentralisasi 1922 terdapat susunan pemerintahan pada pasal 4 *stadsgemeenteordonnantie* yaitu 1) *Stadsgemeente* dipimpin oleh suatu *raad*, *College van Burgemeester en Wethouders* dan *burgemeester* (Wali kota); 2) *Stadsgemeente* dipimpin oleh *raad* dan *burgemeester* saja.

Meester Cornelis masih menganut sistem dengan dua kepemimpinan yakni *raad* dan *burgemeester*. Jabatan

burgemeester baru ditetapkan pada tahun 1921. Hingga pada tahun 1926, undang-undang desentralisasi tahun 1922 baru diterapkan di *Stadsgemeente* Meester Cornelis setelah diterbitkannya *Staatsblad* 1926 No. 367. Perubahan terjadi pada luas wilayah *Stadsgemeente* Meester Cornelis yang bertambah dari sebelumnya saat masih *gemeente* seluas 16 km² menjadi 28,7 km².⁴⁰

Krisis keuangan yang diakibatkan pada sektor *Grondbedrijf* (Perusahaan Tanah) belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya. Upaya penyelesaian dari permasalahan ini, pada paruh kedua tahun 1927, *Gouvernements Advies Commissie van December 1924* (Komisi Penasihat Pemerintah bulan Desember 1924) menyampaikan solusinya dalam bentuk dua proposal yakni proposal mayoritas dan proposal minoritas.

Proposal mayoritas mengusulkan agar membentuk sebuah *Naamlooze Vennootschap* (Perseroan Terbatas) atau disingkat N.V. oleh pemerintah pusat dan pemerintah kotapraja. N.V. ini akan mengambil alih 3 tanah partikelir yang berada di dalam area perencanaan pembangunan kota. Dalam pembelian tanah dan pengeksploitasianya dilakukan dengan dana prioritas. Nilai tanah akan dihitung oleh komisi dan juga menghitung jumlah kerugian operasional. Pemerintah pusat dan pemerintah kotapraja akan menanggung kerugian secara proporsional dengan modal yang diinvestasikan oleh keduanya. Sementara, proposal minoritas mengusulkan untuk mengatasi krisis keuangan dengan cara melakukan pinjaman atau bantuan dana dari pemerintah pusat. Proposal ini telah menyusun jumlah uang yang diperlukan oleh Pemerintah Kotapraja Meester Cornelis yakni sebesar f2.000.000 dalam bentuk utang kepada pemerintah pusat. Pelunasan akan dilakukan oleh pemerintah kotapraja dengan f1.000.000

⁴⁰ Departement van Landbouw, *loc.cit.*

akan dibayarkan secara langsung dengan syarat jika uang pinjaman dibayarkan secara penuh sekaligus. Kemudian, f800.000 diubah menjadi pinjaman tanpa bunga yang akan dibayarkan dalam kurun waktu 40 tahun. Sementara, sisa 5% dari pinjaman akan dianggap sebagai utang oleh pemerintah kotapraja.⁴¹

Pengambilan keputusan mengenai dua usulan ini mengalami penundaan akibat adanya usulan penyatuan wilayah dengan *Stadsgemeente* Batavia. Pada tahun-tahun selanjutnya, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemasukan kas kota, mulai dari pemberlakuan pajak baik ditambah maupun peningkatan biaya. Selain dari pajak, perusahaan-perusahaan milik kota juga berkontribusi dalam meningkatkan pemasukan sekaligus pembangunan kota. Pada tahun 1929 terdapat 8 perusahaan di antaranya adalah *Grondbedrijf*, *Waterleidingbedrijf*, *Marktbedrijf*, *Slachthuisbedrijf*, *Huizenbedrijf*, *Begraafplaatsbedrijf*, *Magazijn en-Werkplaatsbedrijf*, dan *Beerputledigingsbedrijf*. Penyelesaian perusahaan tanah digunakan proposal minoritas dari Komite Penasihat Pemerintah (*Gouvernements Adviescommissie*) sebagai dasar.⁴²

Pada 1927 usulan penyatuan wilayah antara *Stadsgemeente* Meester Cornelis dan *Stadsgemeente* Batavia kembali digaungkan. Usulan penyatuan ini dikemukakan pada di sidang *Volksraad* oleh salah satu *Wethouder* Batavia, M. H. Thamrin.⁴³ Pada tahun 1930, keputusan penyatuan disampaikan langsung oleh Direktur B.B (*Binnenlandsch Bestuur*), A. Muhlenfelt. Dalam surat kabar kotapraja, van Doorninck, Wali Kota Meester Cornelis, sangat senang dengan pengumuman dari direktur B.B. bahwa pada prinsipnya pemerintah memutuskan untuk

menggabungkan kotamadya Batavia dan Meester Cornelis.⁴⁴ Pada akhirnya penyatuan wilayah antara *Stadsgemeente* Batavia dan *Stadsgemeente* Meester Cornelis menemui hasil dengan diterbitkannya ordonansi yang dimuat dalam *Staatsblad* 1934 No. 687 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1935.⁴⁵ Secara resmi, nama Meester Cornelis dihapus dan dimasukkan ke wilayah Batavia. Dengan penyatuan ini, luas wilayah Batavia menjadi 182 km². Anggota Dewan Meester Cornelis masuk ke dalam Dewan Batavia. Dengan ini total anggota Dewan Batavia berjumlah 42 orang, terdiri atas 24 orang Belanda; 12 orang pribumi non-Belanda; dan 6 orang warga asing non-Belanda.⁴⁶

F. Penutup

Pemilihan tersebut didasarkan oleh dua hal yakni keuangan daerah dan tempat tinggal orang-orang Belanda. Letak yang strategis tersebut membuat Meester Cornelis berkembang dalam perdagangan. Meester Cornelis juga banyak dihuni oleh orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Hindia Belanda. Semakin tidak terurusnya wilayah tempat tinggal mereka, warga Belanda di Meester Cornelis menuntut agar pemerintah Hindia Belanda lebih memperhatikan dan dapat mengelola masyarakat secara mandiri dengan membentuk pemerintahan otonom. Pada periode desentralisasi 1905-1935 Meester Cornelis telah mengalami pasang surut terkait kondisi keuangan kota. Namun, di satu sisi juga mengalami perkembangan pesat pada bidang infrastruktur tata kota. Meester Cornelis berhasil melalui masa krisis keuangan berkat pendapatan dari sektor pajak dan juga perusahaan kota. Pemerintahan mandiri dari *Stadsgemeente* Meester Cornelis harus berakhir dengan

⁴¹ F. W. M. Kerchman, *op.cit.*, hlm. 252.

⁴² *Ibid*, hlm. 260.

⁴³ "Uit de Volksraad", *De Standaard*, 19 Juli 1927.

⁴⁴ "Onthulling", *Bataviasch Nieuwsblad*, 19 April 1930.

⁴⁵ *Staatsblad van Nederlandsch Indië* 1934 No. 687.

⁴⁶ *Staatsblad van Nederlandsch Indië* 1934 No. 687.

penyatuan wilayah dengan *Stadsgemeente* Batavia yang dimulai tahun 1935.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1905 No. 206.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1934 No. 687.

Buku

Abdurrachman Surjomihardjo. 1977. *Perkembangan Kota Jakarta*. Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah Pemerintah DKI Jakarta.

Abd Rahman Hamid dan M. Saleh Madjid. 2014. *Pengantar Ilmu sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Ballegoijen de Jong, Michiel van. 1993. *Spoorwegstations op Java*. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.

Benny G. Setiono. 2008. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: TransMedia.

Blink, H.. 1907. *Nederlandsch Oost- en West-Indie*. Leiden: E. J. Brill.

Departement van Landbouw. 1933. *Volkstelling 1930: Inhemsche Bevolking van West-Java Deel 1*. Batavia: Landsdrukkerij.

Gie, The Liang. 1958. *Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta*. Jakarta: Kotapradja Djakarta Raja.

_____. 1967. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia: Jilid I*. Jakarta: Gunung Agung.-

Gouda, Frances. 2007. *Dutch Culture Overseas Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Haan, F. de. 1922. *Oud Java*. Weltevreden: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en G. Kolff & Co.,

Kerchman, F. W. M. 1930. *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indië 1905-1930*. Weltevreden: G. Kolff & Co.,

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. 1977. *Sejarah*

Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Rachmat Ruchiat. 2018. *Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta*. Jakarta: Masup Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2004. *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda*. Malang: Bayumedia.

Artikel

Aryandini Novita dan M. Irfan Mahmud. 1999. "Tata Ruang Etnis Dan Profesi Dalam Kota (Abad XVII-XVIII)", Dalam *Berkala Arkeologi* Vol. 19, No. 2.

P.H. van der Brug. 1997. "Malaria in Batavia in 18th Century". Dalam *Tropical Medicine and International Health* Vol. 2 No. 9.

Teti Hestiliani. 2019. "Secentralisatie Wet Van Nederland Indies 1903". Dalam *Jurnal ISTORIA* Vol. 15 No. 2.

Skripsi dan Disertasi

Effendi Wahyono. 2009. "Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda: Perubahan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Bestuurshervormingswet 1922". *Disertasi*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Rinno Widiyanto. 2009. "Gereja Koinonia, Meester Cornelis Jatinegara, Gaya dan Ragam Hias". *Skripsi*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

Surat Kabar

Bataviaasch Nieuwsblad, 17 Agustus 1925.

Bataviaasch Nieuwsblad, 19 April 1930.

De Staandaard, 19 Juli 1927.